

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut Kepala Daerah mempunyai kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dilakukan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan (*progress report*) dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011–2016.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011–2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 62);

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 wilayah kecamatan 272 desa dan 13 kelurahan dengan kondisi geografis pada daerah pegunungan, daerah datar dan daerah pantai. Dengan kondisi daerah tersebut tiap-tiap kecamatan mempunyai karakteristik yang berbeda karena potensi wilayahnya berbeda pula. Wilayah Kabupaten Pekalongan membentang antara 109°49' - 109°78' Bujur Timur dan 6° 83' - 7° 23' Lintang Selatan.

Secara administratif Kabupaten Pekalongan dibatasi oleh:

- Sebelah Utara Kota Pekalongan dan Laut Jawa
- Sebelah Timur Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat Kabupaten Pemalang
- Sebelah Barat Daya dengan Kabupaten Purbalingga

Luas wilayah Keseluruhan Kabupaten Pekalongan ± 836,13 km². Wilayah ini terbagi menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kandangserang	60,55	14
2	Paninggaran	92,99	15
3	Lebakbarang	58,20	11
4	Petungkriyono	73,58	9
5	Talun	58,57	10
6	Doro	68,45	14
7	Karanganyar	63,48	15
8	Kajen	75,15	25
9	Kesesi	68,52	23
10	Sragi	32,40	17
11	Bojong	40,06	22
12	Wonopringgo	18,80	14
13	Kedungwuni	22,94	19
14	Buaran	9,54	10
15	Tirto	17,39	16
16	Wiradesa	12,71	16
17	Siwalan	25,91	13
18	Karangdadap	20,99	11
19	Wonokerto	15,90	11
	Jumlah	836,13	285

Sumber : BAPPEDA Kab. Pekalongan, 2013

Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki pengunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai dengan 1.294 meter diatas permukaan laut. Wilayah pantai terletak dibagian utara, wilayah dataran rendah terletak dibagian barat, tengah dan timur, wilayah pegunungan berada dibagian selatan.

Sedangkan untuk jumlah bangunan rumah atau tempat tinggal penduduk di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah			Jumlah
		A	B	C	
1	Kandangserang	1.459	4.781	2.827	9.067
2	Paninggaran	1.387	2.940	3.290	7.617
3	Lebakbarang	804	471	936	2.211
4	Petungkriyono	651	1.012	951	2.614
5	Talun	3.915	1.365	745	6.025
6	Doro	4.559	2.430	1.619	8.608
7	Karanganyar	2.394	3.067	2.357	7.818
8	Kajen	2.742	4.591	3.214	10.547
9	Kesesi	5.211	5.881	4.336	15.428
10	Sragi	4.424	5.880	4.343	14.647
11	Siwalan	5.603	3.055	1.911	10.569
12	Bojong	2.250	4.413	1.766	8.429
13	Wonopringgo	6.863	6.026	4.607	17.496
14	Kedungwuni	6.557	533	1.332	8.422
15	Karangdadap	6.229	3.624	3.503	13.356
16	Buaran	5.073	4.222	2.777	12.072
17	Tirto	3.612	2.895	2.808	9.315
18	Wiradesa	2.857	3.665	3.256	9.778
19	Wonokerto	2.492	3.086	1.523	7.101
	Jumlah	69.082	63.937	48.101	181.120

Sumber : DDA Kab. Pekalongan, 2012

Secara umum jenis rumah terbagi atas 3 tipe disesuaikan dengan standar kesehatan. Tipe A adalah rumah layak huni dan sesuai standar kesehatan sebanyak 69.082 unit naik 3,24% dari tahun sebelumnya yang hanya 66.911 unit, Tipe B adalah rumah layak huni tetapi belum memenuhi standar kesehatan sebanyak 63.937 unit atau turun 4,19% dari tahun sebelumnya yang mencapai 66.737 unit, Sedangkan Tipe C adalah rumah belum layak huni dan belum memenuhi standar kesehatan sebanyak 48.101 unit atau turun 4,79 dari tahun sebelumnya mencapai 50.519 unit. Rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 186.044 unit, rumah tangga bersanitasi sebanyak 130.861 unit, sedangkan luas lingkungan permukiman kumuh seluas 11,24 km².

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sebanyak 932.295 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 474.543 jiwa dan perempuan sebanyak 457.752 jiwa, yang tersebar di 19 wilayah kecamatan (285 desa/kelurahan). Struktur usia penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2012 sesuai Data Base DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan kondisi 31 Desember 2013 dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Struktur Usia Penduduk Kab. Pekalongan Tahun 2012

Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
75 keatas	5.809	6.270	12.079
70 - 74	6.378	6.557	12.935
65 - 69	7.909	8.316	16.225
60 - 64	13.761	12.691	26.452
55 - 59	19.241	17.860	37.101
50 - 54	25.629	25.427	51.056
45 - 49	28.905	29.640	58.545
40 - 44	32.505	32.847	65.352
35 - 39	35.308	34.626	69.934
30 - 34	42.919	40.939	83.858
25 - 29	41.402	40.258	81.660
20 - 24	45.835	44.131	89.966
15 - 19	46.119	43.244	89.363
10 - 14	44.538	41.762	86.300
5 - 9	41.761	39.230	80.991
0 - 4	36.524	33.954	70.478
JUMLAH	474.543	457.752	932.295

Sumber : DINDUKCAPIL Kab. Pekalongan, 2013

Sedangkan menurut jenis kelamin penduduk baik laki-laki dan perempuan sesuai Data Base DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan (SIAK) kondisi 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pekalongan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kandangserang	16.673	16.167	32.840
2	Paninggaran	20.467	19.673	40.140
3	Lebakbarang	5.376	5.144	10.520
4	Petungkriyono	6.212	5.833	12.045
5	Talun	14.537	13.666	28.203
6	Doro	22.620	21.088	43.708
7	Karanganyar	21.605	20.970	42.575
8	Kajen	35.056	34.072	69.128
9	Kesesi	35.750	35.032	70.782
10	Sragi	31.580	31.532	63.112
11	Bojong	37.286	35.877	73.163
12	Wonopringgo	23.910	22.761	46.671
13	Kedungwuni	48.596	46.332	94.928
14	Buaran	23.278	22.086	45.364
15	Tirto	35.900	34.339	70.239
16	Wiradesa	30.572	29.531	60.103
17	Siwalan	23.210	23.123	46.333
18	Karangdadap	18.604	17.883	36.487
19	Wonokerto	23.311	22.643	45.954
	JUMLAH	474.543	457.752	932.295

Sumber : Kemendagri, 2013

Distribusi penduduk menurut kecamatan, terbanyak berada di Kecamatan Kedungwuni, yaitu sebanyak 94.928 jiwa, kemudian Kecamatan Bojong sebanyak 73.163 jiwa, dan Kecamatan Kesesi sebanyak 70.782 jiwa. Kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lebakbarang, yaitu sebanyak 10.520 jiwa. Selama tahun 2013, Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.030 jiwa/km² dengan wilayah penduduk terpadat berada di Kecamatan Wiradesa (4.552 jiwa/km²). Sedangkan Kecamatan Petungkriyono merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan pendudukan paling rendah (167 jiwa/km²). Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk, Luas Area dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²
Kandangserang	32.712	60,55	540
Paninggaran	34.977	92,99	376
Lebakbarang	10.172	58,20	175
Petungkriyono	12.290	73,59	167
Talun	26.236	58,57	448
Doro	37.802	68,45	552
Karanganyar	36.554	63,48	576
Kajen	58.873	75,15	783
Kesesi	62.100	68,51	906
Sragi	61.951	32,40	1.912
Bojong	63.373	40,06	1.582
Wonopringgo	42.163	18,80	2.243
Kedungwuni	94.065	22,93	4.102
Buaran	44.082	9,54	4.621
Tirto	67.945	17,39	3.907
Wiradesa	57.812	12,70	4.552
Siwalan	38.110	25,91	1.471
Karangdadap	34.726	21,00	1.654
Wonokerto	45.423	15,91	2.855
JUMLAH	861.366	836,13	1.030

Sumber : Bapeda Kab. Pekalongan, 2013

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi ekonomi daerah kabupaten Pekalongan sebagai potensi andalan daerah memiliki daya saing dan keunikan tertentu, yang membedakan dengan daerah lain. Penetapan produk unggulan daerah telah ditempuh melalui sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri, Perdagangan serta Pariwisata. Dengan telah ditetapkannya produk-produk unggulan diharapkan dapat memacu para pelaku ekonomi daerah

dalam mengembangkan kreativitas dan usahanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Kinerja makro ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi. PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2013 atas harga berlaku mencapai Rp. 11.298.352,86 juta atau meningkat Rp.2.363.598,61 juta dibandingkan pada tahun 2012. Sedangkan atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 tercapai sebesar Rp. 3.978.784,49 juta atau meningkat Rp.414.185,42 juta dibandingkan tahun 2012.

Tabel 1.6
PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Harga Berlaku

NO	LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	1.281.111,66	1.497.434,35	1.650.754,71	181.7994,98	2.200.250,13
2	Pertambangan dan Penggalian	67.005,40	69.565,01	75.232,24	81.946,36	96.473,29
3	Industri Pengolahan	1.753.695,72	1.941.608,02	2.192.601,41	2.453.894,14	3.148.095,08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	88.718,90	98.014,90	107.338,80	117.526,18	143.550,63
5	Konstruksi	399.146,84	443.000,55	480.070,47	527.184,47	677.387,80
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.207.587,29	1.350.784,20	1.477.681,25	1.654.200,01	2.104.936,20
7	Pengangkutan dan Komunikasi	244.663,86	277.842,52	292.659,86	324.889,62	415.347,45
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	308.713,40	343.383,51	367.330,36	410.274,40	538.061,53
9	Jasa-jasa	1.085.539,94	1.209.199,31	1.389.775,33	1.546.844,09	1.974.250,75
J U M L A H		6.436.183,01	7.230.832,36	8.033.444,43	8.934.754,25	11.298.352,86

Sumber : DDA Kab. Pekalongan, 2012

Tabel 1.7
PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Harga Konstan

NO	LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	675.343,08	699.703,08	699.039,57	725.824,91	755.758,04
2	Pertambangan dan Penggalian	33.828,85	32.965,19	34.272,98	36.182,47	37.565,87
3	Industri Pengolahan	803.973,24	837.955,07	894.472,12	942.638,70	997.742,21
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	35.121,76	37.167,24	38.841,22	41.225,23	43.664,15
5	Konstruksi	194.255,53	202.363,53	213.635,80	224.326,83	253.130,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	577.030,99	601.882,22	644.985,40	685.062,40	769.042,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	120.837,08	127.791,58	133.038,04	141.973,01	159.605,90
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	134.449,44	141.124,51	148.173,32	158.394,28	181.094,61
9	Jasa-jasa	523.231,52	549.398,81	577.929,27	608.971,24	682.650,90
	JUMLAH	3.098.071,49	3.230.351,23	3.384.387,72	3.564.599,07	3.978.784,49

Sumber : DDA Kab. Pekalongan, 2012

Apabila dilihat dari peranan sektor dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2013 atas harga berlaku, sektor industri pengolahan masih tertinggi yaitu sebesar Rp. 3.148.095,08 juta, disusul sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp. 2.200.250,13, sektor perdagangan, restoran dan hotel memberi kontribusi Rp.2.104.936,20.